

Wali Kota Kupang Ajak REI Terus Berkolaborasi Bangun Kota di Tengah Keterbatasan Anggaran



Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, mengajak Real Estate Indonesia (REI) NTT untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun Kota Kupang, meskipun di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara Welcome Dinner menyongsong Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD REI NTT Tahun 2025, yang digelar di Pitobay Sport Center, Selasa malam (29/7/2025).

“Anggaran kita dipangkas hingga 50 persen, termasuk perjalanan dinas. Tapi justru di saat sulit ini, REI hadir membantu kami. Terima kasih untuk kolaborasi yang luar biasa,” ujar Wali Kota.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya dan Wakil Wali Kota tidak mengadakan pembelian mobil dinas baru demi efisiensi, yang telah menghemat hingga Rp4 miliar untuk dialihkan ke program-program pro-rakyat, termasuk bantuan rumah layak huni dan renovasi kawasan kumuh.

Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa kawasan kumuh bukan

sekadar cerminan buruknya tata kelola ruang, melainkan simbol ketimpangan akses terhadap layanan dasar, ketidakpastian hukum lahan, dan penurunan daya beli masyarakat.

Ia pun memuji sektor properti yang digerakkan REI karena mampu mendorong lebih dari 180 sektor ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja.

“Kalau ingin jalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau ingin jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Mari terus bergotong royong membangun Kupang,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, yang hadir dalam kesempatan tersebut, menyampaikan dukungannya terhadap DPD REI NTT dan semangat kolaboratif yang ditunjukkan.

“NTT ini sejuk, penuh kehangatan. Saya hadir untuk mendukung teman-teman DPD yang semangat membangun daerah. Insya Allah, bisnis kita akan klik, dan kami akan terus mencari peluang untuk kemajuan bersama,” katanya.

Acara Welcome Dinner tersebut menjadi momentum penuh kekeluargaan yang memperkuat sinergi antara Pemkot Kupang dan pelaku industri properti dalam upaya pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. (MI)

Diduga Langgar Kode Etik, Anggota DPRD Mandailing Natal Dilaporkan ke BKD



Panyabungan, nwartapedia.com – Seorang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Ahmad Yusuf, dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, dilaporkan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Mandailing Natal oleh Aliansi Masyarakat Mandailing Natal Menggugat.

Laporan tersebut menyangkut dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana tertuang dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.

Dalam surat yang ditujukan kepada BKD, Ketua Fraksi PKS Mandailing Natal, dan Ketua DPC PKS Mandailing Natal, Ahmad Yusuf disebut melakukan tindakan tidak pantas saat mendampingi Kepala Desa Simpang Kojé dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat Mandailing Natal.

Ia dilaporkan datang ke kantor inspektorat dengan mengenakan atribut resmi sebagai anggota DPRD, termasuk pin dewan, saat proses pemeriksaan masih berlangsung, serta diduga melakukan intervensi terhadap jalannya pemeriksaan.

Aliansi tersebut mengecam keras tindakan Ahmad Yusuf, karena dinilai mencoreng nama baik institusi DPRD dan tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat.

Mereka menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.

“Kami meminta BKD DPRD Mandailing Natal segera melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Yusuf atas dugaan pelanggaran kode etik ini. Tindakan yang dilakukan sangat tidak patut dan melecehkan integritas lembaga legislatif daerah,” tulis perwakilan aliansi dalam surat pengaduannya.

Ketua Gerakan Mahasiswa Madina Menggugat (GM3), Dedi Aliansyah, menilai tindakan Ahmad Yusuf sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

“Seorang anggota dewan seharusnya menjadi teladan, bukan malah menggunakan jabatannya untuk melindungi pihak yang sedang diperiksa. Ini bentuk nyata pelanggaran etika,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Pemuda Pantai Barat (Gempita), Rifwan Efendi, menyayangkan keberpihakan Ahmad Yusuf yang dinilai mencederai kepercayaan masyarakat.

“Kami kecewa melihat seorang anggota DPRD terang-terangan berpihak, seolah-olah proses hukum dan pemeriksaan bisa diintervensi begitu saja. Ini preseden buruk bagi demokrasi lokal,” ujarnya.

Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa (GPM) Simpang Sordang, Rizal Bakri, mendesak agar DPRD bertindak cepat dan transparan.

“Jangan sampai lembaga dewan kehilangan wibawa hanya karena satu oknum. Kami minta proses etik ini dilakukan secara terbuka agar publik tahu siapa yang masih layak disebut wakil rakyat,” pungkasnya. (Tim)

Wali Kota Kupang: Dokumen

RT2KPK Jadi Langkah Strategis Atasi Permukiman Kumuh



Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang menegaskan pentingnya penyusunan dokumen Rencana Tindak Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RT2KPK) sebagai dasar kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan permukiman rentan.

Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Pencegahan dan peningkatan pemukiman kumuh Kota Kupang yang digelar di Neo Aston Hotel pada Selasa (29/7/2025)..

Dalam sambutannya, Wali Kota menyebut bahwa persoalan permukiman kumuh bukan hanya menyangkut tata kelola ruang yang buruk, tetapi juga menjadi indikator ketimpangan sosial dan ekonomi.

“Kawasan kumuh mencerminkan kurangnya akses terhadap layanan dasar, menurunnya daya beli masyarakat, hingga ketiadaan kepastian hukum atas kepemilikan tanah,” ujarnya.

Ia menambahkan, dokumen RT2KPK sangat penting untuk mencegah tumbuhnya kawasan kumuh baru serta meningkatkan kondisi kawasan yang telah ada agar menjadi lingkungan yang layak huni.

“Permukiman yang sehat akan melahirkan manusia yang sehat. Dari sana, kita bangun SDM yang berkualitas dan berkarakter,” tegasnya.

Wali Kota juga mengapresiasi keterlibatan aktif tim ahli, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen tersebut.

Ia menekankan bahwa otonomi daerah bukan semata soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Sementara itu, Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas PRKP Kota Kupang, Bustaman, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen RT2KPK dilakukan melalui tujuh tahapan. Dokumen ini akan menjadi pedoman (kompas) bagi Pemerintah Kota Kupang dalam menyusun program dan kebijakan penanganan permukiman kumuh.

“RT2KPK juga merupakan dokumen teknis yang dibutuhkan sebagai syarat integrasi program pembangunan dengan kebijakan pusat, sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian dan Dirjen Cipta Karya,” jelas Bustaman.

Ia menambahkan bahwa dokumen ini harus disinergikan dengan dokumen lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) agar seluruh kebijakan berjalan selaras dan terintegrasi.

“RT2KPK ini akan menjadi rujukan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Kupang,” pungkasnya. (MI)

Ebenhezer Simanjuntak:
Program Makan Bergizi Gratis

Berjalan Lancar di Sekolah Pinggiran Kota Kupang



Kupang, nwartapedia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah terus berjalan dengan lancar di salah satu sekolah menengah atas di kawasan pinggiran Kota Kupang.

Plt. Kepala sekolah SMAN 10 Kupang, Ebenhezer Simanjuntak yang baru menjabat selama lima bulan itu kepada media ini Senin tanggal 20 Juli 2025 mengungkapkan bahwa distribusi makanan kepada para siswa sejauh ini berlangsung baik, meskipun sesekali terdapat catatan minor terkait kualitas atau variasi makanan yang langsung ditindaklanjuti oleh pihak sekolah dan dapur penyedia.

“Selama ini pelaksanaan MBG di sekolah kami berjalan baik-baik saja dan lengkap. Kadang buahnya berganti-ganti, hari ini jeruk, besok buah lain, tapi tetap kami usahakan selalu tersedia. Kalau ada keluhan, langsung kami sampaikan ke pihak dapur,” ujar sang kepala sekolah yang sebelumnya bertugas di SMAN 4 Kupang dan hingga kini masih mengajar fisika di sana.

Pihak sekolah menekankan pentingnya kebersihan dan keterbukaan dalam menyampaikan keluhan.

“Kami selalu imbau anak-anak untuk cuci tangan sebelum makan, dan jika ada makanan yang kurang enak, misalnya terlalu asin atau daunnya pahit, langsung diberi tahu agar kami bisa segera

menggantinya,” lanjutnya.

Polikarpus juga menambahkan, program MBG ini dinilai sangat membantu, khususnya bagi para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di wilayah pinggiran.

Selain memberikan asupan nutrisi, baginya, program ini juga mendorong kebiasaan hidup sehat dan membentuk kedisiplinan siswa dalam menjaga pola makan.

“Memang butuh penyesuaian, apalagi anak-anak terbiasa dengan makanan pedas seperti pakai lombok, tapi kami jelaskan bahwa makanan ini sudah diuji ahli gizi, dan aman untuk mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua OSIS SMAN 10, Mira masanya oetpah menyampaikan bahwa program ini sangat membantu, terutama bagi siswa laki-laki yang sebelumnya sering pulang ke rumah hanya untuk makan siang.

“Selama ini banyak teman-teman, khususnya siswa laki-laki, sering pulang karena lapar. Tapi sejak ada makan siang gratis, mereka tidak pulang lagi dan tetap mengikuti pelajaran dengan baik,” ungkapnya.

Ia juga menilai kualitas makanan yang disediakan cukup memuaskan. Menurutnya, menu yang disajikan enak, sehat, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa selama di sekolah.

“Makanannya enak dan bergizi, kami sangat bersyukur dengan adanya program ini. Semoga bisa terus berjalan,” pungkasnya. (MI)

Program MBG SMPN 18 Kupang Berjalan Baik, Guru Awasi Kualitas Makanan Setiap Hari



Kupang, nwartapedia.com – Program makan siang bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat dan diterapkan di SMP Negeri 18 Kupang berjalan lancar dan mendapat pengawasan ketat dari pihak sekolah.

Hal ini disampaikan oleh Siti Hainun Korsani Resi, Kepala Urusan Kurikulum SMPN 18 Kupang, saat ditemui media ini pada Selasa, (28/7/2025).

Menurut Siti Hainun, pelaksanaan program ini telah aktif berjalan setiap hari sejak awal pembelajaran semester baru, tepatnya pada 14 Juli 2025.

Ia mengatakan, setiap hari, para guru yang bertugas piket melakukan pengecekan kualitas makanan sebelum dibagikan kepada siswa.

“Pagi hari saat makanan datang, guru piket selalu cek. Makanannya dicek dari aroma, rasa, dan terutama menu yang riskan seperti daging dan ikan. Kami cicipi dulu sebelum anak-anak makan,”

ungkapnya.

Siti menjelaskan, perhatian khusus diberikan pada menu seperti ikan yang bisa menyebabkan alergi dan daging yang rentan basi jika tidak diolah dengan benar.

Oleh karena itu, sebelum makanan dibagikan, pihak sekolah juga rutin mengingatkan siswa untuk mencuci tangan dan mengecek kondisi makanan mereka.

“Kami selalu sampaikan kepada siswa agar memperhatikan makanan mereka. Kalau tercium bau aneh atau ada semut, mereka bisa langsung lapor. Tapi sejauh ini tidak ada keluhan soal makanan rusak,” tambahnya.

Terkait selera makan, Siti mengakui bahwa hal tersebut bersifat relatif. Ada anak-anak yang mengeluh kurang garam atau tidak suka dengan menu tertentu, namun tidak ada yang menolak makan sama sekali.

“Selera itu beda-beda. Tapi secara umum, makanan selalu habis. Paling hanya sekitar 25 persen yang tidak habis, dan itu pun dalam jumlah sedikit,” jelasnya.

Program makan siang bergizi gratis ini bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang siswa serta meningkatkan konsentrasi belajar di sekolah.

Pihak SMPN 18 Kupang berharap program ini dapat terus berjalan dengan baik dan tetap mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dalam hal pengawasan mutu dan keberlanjutan pasokan makanan. (MI)

10 ASN Dinas Pendidikan Kota Kupang Ikuti Pilot Project Penyusunan Instrumen Evaluasi Pasca Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila



Kupang, nwartapedia.com – Sebanyak 10 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ditugaskan mengikuti kegiatan Pilot Project Survei Pasca Pendidikan Ideologi Pancasila, Selasa (29/7/2025).

Kegiatan ini berlangsung di salah satu Aula Hotel Kupang, dan merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Kupang dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Survei ini bertujuan untuk menggali kembali pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN, sebagai awal proyek Ideologi Nasionak.

Kehadiran ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat

menjadi motor penggerak dalam membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi milenial yang kini semakin dipengaruhi nilai-nilai sosial modern yang berpotensi menjauhkan dari akar kebangsaan.

“Kita menyadari bahwa pemahaman ideologi Pancasila sulit terdesiminasikan di kalangan masyarakat, khususnya kaum muda. Generasi milenial cenderung mengadopsi nilai-nilai sosial baru berbasis modernitas yang sering kali menjauh dari literasi kebangsaan,” ujar Eben Bolla, Ketua Tim Utusan Dinas Pendidikan.

Menurut Eben, survei ini menjadi momentum untuk membangun kembali kesadaran ideologis di kalangan ASN, sekaligus memberi contoh konkret bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Sepuluh ASN yang mengikuti kegiatan ini antara lain Febrika Lerek, S.Pd, Eben Bolla, Gregorius Takene, SE, Jackson Ndun, S.Sos, Januarius A. Ola Angin, S.Pd, Yeffri Hitahirun, Tirza E. Djami, Enjelina S.W. Boeky, Liverthina Huma, S.Kom Delsi R. Kawurung, S.Pd.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Ambo, menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh peserta.

“Saya berharap para ASN yang diutus benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan serius. Hasil dari kegiatan ini dapat menjadi proyek internal untuk diterapkan di lingkungan kerja masing-masing,” tegasnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi refleksi bahwa revitalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan birokrasi merupakan kebutuhan mendesak, di tengah tantangan ideologi dan disrupsi nilai yang berkembang pesat saat ini.

(goe)

Pemkot Kupang Gelar Pilot Project Penyusunan Instrumen Evaluasi Pasca Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila



Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang melalui Sekretariat Daerah kembali menggelar kegiatan strategis dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui Pilot Project Pengembangan Instrumen Survei Pasca Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Selasa, 29 Juli 2025 pukul 10.00 WITA hingga selesai, dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 12 perangkat daerah di lingkungan Pemkot Kupang.

Informasi resmi tersebut diteruskan oleh Johnatan Sinlae, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, melalui grup WhatsApp resmi Dinas Pendidikan, Senin (28/7/2025).

Ia menyampaikan pesan dari Plt. Sekretaris Daerah Kota Kupang yang

menginstruksikan agar setiap perangkat daerah menugaskan ASN untuk menjadi responden dalam survei tersebut.

“Survei ini merupakan bagian dari pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan ideologi Pancasila, sebagaimana amanat Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024,” ujar Johnatan dalam keterangannya.

Survei ini bertujuan untuk menguji efektivitas instrumen evaluasi pasca-pelatihan ideologi Pancasila yang sebelumnya telah diberikan kepada ASN.

Para peserta akan mengisi survei digital secara bersama dalam satu ruangan, dipandu oleh enumerator.

Jumlah peserta dari masing-masing OPD telah ditentukan, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 10 orang, BKPPD (5 orang), Badan Kesbangpol (7 orang), Dinas Kesehatan (8 orang), serta OPD lainnya masing-masing 2–3 orang.

Kriteria peserta juga ditetapkan cukup spesifik, yakni usia 25–50 tahun, Masa kerja 5–25 tahun, Bukan pendidik atau tenaga kependidikan, Komposisi gender seimbang (50:50), Wajib membawa perangkat pribadi seperti ponsel, tablet, atau laptop dengan baterai memadai dan paket data minimal 100 MB.

Pemerintah juga memastikan adanya fasilitas pendukung, seperti konsumsi (makan siang dan coffee break), serta penggantian biaya transportasi melalui rekening bank peserta.

Bagi peserta yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi panitia melalui kontak yang tersedia, yaitu Eko Budiyanto di nomor 0813-2836-1122.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam memperkuat wawasan kebangsaan ASN serta memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan birokrasi.

(Disdikbud)

Besok, Pemkot Kupang Buka Seleksi Terbuka Eselon II untuk Tujuh Jabatan Kadis



Kupang, [nwartapedia.com](https://www.nwartapedia.com) – Pemerintah Kota Kupang akan memulai proses seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk tujuh posisi pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang, yang dijadwalkan dimulai pada Selasa, 29 Juli 2025.

Tujuh jabatan yang akan diisi melalui seleksi ini merupakan posisi strategis yang saat ini kosong, yakni:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)
3. Kepala Dinas Pertanian
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Kepala Dinas Sosial

7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Proses seleksi dijadwalkan berlangsung selama 15 hari kerja sejak tanggal pembukaan resmi.

Informasi ini disampaikan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Kupang.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kupang, Ignas Lega, menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka ini merupakan implementasi dari prinsip meritokrasi dalam sistem manajemen aparatur sipil negara (ASN).

“Seleksi ini terbuka bagi seluruh ASN yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Kami mengajak partisipasi luas agar jabatan-jabatan penting ini diisi oleh figur-figur yang kompeten, profesional, dan berintegritas,” ungkap Ignas saat memimpin apel bersama di halaman Kantor DPRD Kota Kupang, Senin (28/7/2025).

Ia juga menyampaikan bahwa pengisian jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Kupang.

Seleksi ini akan diawasi secara ketat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya.

Pemerintah Kota Kupang berharap, proses ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin birokrasi yang siap membawa perubahan positif bagi masyarakat. (goe)1

Joshua Voss Sabet Dua Emas di

Kejuaraan Brazilian Jiu-Jitsu Bali, Harumkan Nama NTT



Bali, nwartapedia.com – Bintang muda seni bela diri asal Nusa Tenggara Timur, Joshua Voss, kembali mencuri perhatian publik setelah sukses merebut dua medali emas dalam kejuaraan Brazilian Jiu-Jitsu yang digelar di Bali.

Joshua tampil dominan di dua kategori berbeda: Gi dan No Gi, membuktikan kualitas teknik dan daya juangnya di level kompetitif.

Joshua merupakan siswa dari Excellent Spirit Christian School (ESCS) sekaligus atlet dari Leon Fighting Camp / Prodigium Grappling, komunitas bela diri yang aktif membina bakat muda dari wilayah timur Indonesia.

Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa talenta dari daerah mampu bersaing bahkan unggul di panggung nasional.

<https://nwartapedia.com/wp-content/uploads/2025/07/VID-20250726-WA0134.mp4>

Dibalik kesuksesan ini, peran penting dua pelatih utamanya, Coach Heath dan Coach Leon, tak bisa dipisahkan. Dalam pernyataannya, mereka mengungkapkan rasa bangga atas capaian Joshua.

“Joshua adalah atlet luar biasa dengan potensi besar. Kami percaya dia bisa melangkah jauh dan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di NTT. Kami akan terus mendorong lahirnya juara-juara baru dari daerah ini,” ujar Coach Heath.

Kejuaraan ini juga menjadi panggung gemilang bagi tim Leon Fighting Camp / Prodigium Grappling, yang secara kolektif membawa pulang 11 medali – terdiri dari 4 emas, 3 perak, dan 4 perunggu.

Hasil ini menegaskan kekuatan dan konsistensi tim dalam membina para atlet muda secara serius dan berkelanjutan.

Kemenangan Joshua bukan hanya milik pribadi, tetapi juga kebanggaan bersama masyarakat NTT.

Semangat, dedikasi, dan kerja keras yang ditunjukkannya menjadi inspirasi nyata bahwa anak muda dari daerah memiliki peluang besar untuk bersinar dan membawa nama daerah ke panggung nasional, bahkan internasional. (MI,l

Wali Kota Kupang Serahkan Dana PEM Tahap VI untuk Warga Nunhila



Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, secara resmi menyerahkan Dana PEM Tahap VI Tahun 2025 kepada warga Kelurahan Nunhila dalam sebuah acara yang digelar di Kantor Lurah Nunhila, Jumat (25/7).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Kupang Dapil Alak, Amiruddin La Oda, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang, Camat Alak, para Lurah se-Kecamatan Alak, Ketua LPM Kelurahan Nunhila Matheos A. Lasa, para pengurus LKK, tokoh agama dan masyarakat, serta para penerima manfaat Dana PEM.

Dalam sambutannya, Wali Kota Christian Widodo menegaskan bahwa Dana PEM bukan hanya bantuan finansial, melainkan bentuk kehadiran pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan warganya.

Ia mendorong para penerima untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana, disiplin, dan fokus dalam menjalankan usaha.

“Saya titip, kelola dana ini dengan penuh tanggung jawab. Jangan asal ganti usaha. Fokus, adaptif terhadap perkembangan zaman, sekarang media sosial bisa dimanfaatkan untuk usaha. Kami ingin masyarakat bisa berdaya dan mandiri secara ekonomi, bisa beli beras, bisa sekolahkan anak, dan hidup lebih sejahtera,” ungkap Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Kupang atas sinergi dan dukungan terhadap berbagai program pro-rakyat, yang disebutnya sebagai kunci akselerasi pembangunan Kota Kupang.

Sementara itu, Ketua LPM Kelurahan Nunhila, Matheos A. Lasa, dalam laporannya menyebutkan bahwa sejak 2013 hingga 2025, total Dana PEM yang telah digulirkan di Kelurahan Nunhila mencapai Rp2.081.400.000 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 286 orang.

Pada tahap VI ini, sebanyak 70 warga menerima bantuan dengan total anggaran Rp310 juta dari total 89 usulan yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak.

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada enam penerima, masing-masing mendapatkan dana sebesar Rp10 juta, Rp7 juta, Rp6 juta, Rp5 juta, Rp4 juta, dan Rp3 juta.

Per Juli 2025, total dana yang masih dikelola mencapai Rp797.252.471, terdiri dari saldo akhir Rp485.501.471, tunggakan Rp272.172.151, dan pemutihan Rp39.600.000. Dari total pagu awal Rp750 juta, pengelolaan Dana PEM menunjukkan selisih lebih sebesar Rp47.252.471.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama. Suasana menjadi semakin hangat ketika Wali Kota menyempatkan waktu untuk berfoto dengan warga, menciptakan momen yang penuh keakraban.

Program Dana PEM merupakan salah satu program strategis Pemkot Kupang dalam memperkuat ketahanan ekonomi warga dari tingkat kelurahan, mendukung usaha mikro, dan menumbuhkan semangat kemandirian di tengah masyarakat. ***